

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA MALANG (STUDI PADA DINAS SOSIAL KOTA MALANG)

Sayyida Amalia¹, Afifuddin², Langgeng Rachmatullah Putra³

*Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: ayiamaliaa@gmail.com*

ABSTRAK

Negara yang sejahtera adalah arah tujuan bangsa Indonesia. Maka makna kemerdekaan menjadi lebih dari sekedar bebas dari penjajahan, melainkan terpenuhinya masyarakat yang adil serta makmur. Usaha pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan sosial ini tentunya tidak lepas dari aspek kemiskinan. Dalam rangka peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan pemerintah meningkatkan akses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, diperlukan suatu program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan menjadi dasar pertimbangan ditetapkan Permensos RI No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, serta mengubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan terutama pada kelompok RTM. Dalam penelitian ini metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan peneliti dengan menggunakan sumber data berupa data primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang diukur dari enam variabel, yaitu: (1) Efektivitas; (2) Efisiensi; (3) Kecukupan; (4) Perataan; (5) Responsivitas; (6) Ketepatan. Penelitian ini menghasilkan bahwasanya evaluasi kebijakan program PKH di Kota Malang telah terlaksana dengan baik. Namun dari keenam indikator evaluasi, beberapa indikator kurang berjalan maksimal, selain itu juga masih didapati beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH seperti alat bayar keluarga manfaat (KPM) yang bermasalah, penerima manfaat belum menerima alat bayar, jumlah bantuan tidak sesuai dengan komponen yang dimiliki, masih banyak warga yang kurang mampu belum menerima bantuan, perubahan mental/mindset masyarakat penerima bantuan, sistem terbaru dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) peserta PKH banyak yang dikeluarkan by sistem tanpa adanya konfirmasi.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Program Keluarga Harapan

Pendahuluan

Negara yang sejahtera merupakan arah tujuan bangsa Indonesia. Makna kemerdekaan lebih dari kebebasan dari penjajah, akan tetapi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur (Slamet, 2013). Indikator kesejahteraan itu adalah salah satu kemiskinan. Upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial tentunya tidak lepas dari angka kemiskinan. Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang terus menerus dikaji. Kemiskinan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, Pemerintah telah menetapkan UU RI No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Bahwa usaha menangani kemiskinan di Indonesia, dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat secara proaktif, terpadu, dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan,

program dan kegiatan yang memberdayakan, menunjang, dan memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga negara, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.

Kualitas hidup keluarga miskin dan rentan ditingkatkan melalui perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Maka diperlukan suatu program perlindungan sosial yang proaktif, terpadu, dan berkelanjutan sebagai asas penetapan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah strategi perlindungan sosial dengan memberikan bantuan keuangan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) untuk pemenuhan tanggung jawab yang berkaitan dengan edukasi dan kesehatan. Program ini mulai berjalan sejak tahun 2007. Tujuan PKH adalah untuk meringankan RTSM yang kemudian mampu memutus mata rantai kemiskinan

antargenerasi, meninggalkan keturunan kemudian dari kemiskinan.

Masalah kemiskinan di Jawa Timur salah satunya dialami Kota Malang. Berdasarkan laporan Dinas Kominfo dan Statistik Kota Malang pada tahun Maret 2022 dari seluruh penduduk Kota Malang sebanyak 843.810 jiwa angka kemiskinannya mencapai 4,37 persen. Dalam mengatasi kemiskinan di Kota Malang pemerintah berusaha mengurangi angka kemiskinan dengan memaksimalkan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH mendorong KPM agar dapat mengakses layanan sosial dasar seperti kesehatan, edukasi, gizi, perawatan, bantuan, dan berbagai program perlindungan sosial lain.

Perwujudan kebijakan Program Keluarga Harapan sehubungan dengan penanggulangan kemiskinan diatur dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1. Kebijakan telah mencapai waktu yang lama sehingga dibutuhkan evaluasi kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan karena di Kota Malang sendiri dilihat sejak kebijakan ini diterbitkan di tahun 2018 ternyata kemiskinan belum sepenuhnya terputus. Sehingga ini butuh evaluasi terhadap kebijakan. Evaluasi kebijakan sebenarnya adalah pengukuran dan evaluasi terhadap tahapan pelaksanaan kebijakan dan hasil atau efektivitas implementasi kebijakan atau suatu program, sehingga menetapkan tindakan yang akan diambil di masa mendatang. Subarsono (2016:119) berpendapat bahwa evaluasi merupakan aktivitas penilaian kualitas performa suatu aturan. Indikator penilaian terhadap aturan publik berdasarkan penjelasan William N Dunn (2003:158) terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Program ini dikenal sebagai program bantuan tunai bersyarat. Namun, pada faktanya PKH di Kota Malang masih belum optimal dikarenakan yang pertama, kekurangan SDM pendamping. Kedua, angka kemiskinan yang cukup tinggi. Ketiga, ketidakmerataan penyaluran program. Keempat, minimnya koordinasi ketika program dilaksanakan. Kelima, tidak tepat sasaran dalam menggunakan dana bantuan (Kompas.com, 2021). Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Malang (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang?
2. Apa saja aspek pendukung dan hambatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Malang?

Tujuan Penelitian

Tujuan pengkajian ini dilihat dari rumusan masalah

tersebut yaitu.

1. Memahami, mendefinisikan dan menganalisa evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang.
2. Mengetahui, mendefinisikan dan menganalisis aspek pendukung dan hambatan pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui PKH di Kota Malang.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan kajian ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan evaluasi kebijakan publik, khususnya evaluasi program PKH, dengan menyediakan bahan referensi terkait administrasi publik, khususnya evaluasi kebijakan program PKH. Kebijakan untuk studi lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan penelitian menambah pengalaman penulis dalam hal melakukan penelitian mengenai evaluasi kebijakan PKH dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah. Manfaat bagi pihak Dinas Sosial penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terkait program di kantor Dinas Sosial Kota Malang untuk evaluasi program yang lebih baik di masa mendatang.

Tinjauan Pustaka **Kebijakan Publik**

Kebijakan adalah suatu tindakan atau aktivitas yang direncanakan untuk dilaksanakan atau tidak oleh individu, kelompok atau pemerintah yang mempunyai unsur pilihan dalam memilih di antara berbagai pilihan yang ada untuk mewujudkan maksud tertentu.

Kebijakan publik adalah rangkaian tindakan pemerintah, baik dilaksanakan atau tidak, yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai produk hukum, kebijakan publik harus berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik melibatkan proses pemilihan dan pengelompokan pilihan-pilihan terbaik untuk menyelesaikan masalah tertentu yang terjadi pada masyarakat. Kebijakan publik juga meliputi proses timbulnya masalah, bagaimana masalah tersebut diselesaikan, bagaimana kebijakan ditetapkan, dan bagaimana kebijakan diimplementasikan, serta dievaluasi.

Evaluasi Kebijakan

Materialitas evaluasi mengacu pada berbagai ukuran nilai yang terkait dengan hasil kebijakan dan program. Secara umum, evaluasi dianggap setara dengan pemeringkatan, angka pelaporan, dan poin pemberian. Lebih khusus lagi, evaluasi adalah perolehan data tentang nilai dan kegunaan hasil

kebijakan. Suatu kebijakan atau program telah memenuhi tingkat kinerja yang berarti jika hasil kebijakan tersebut benar-benar bernilai, yang berarti bahwa permasalahan kebijakan telah ditekankan atau diselesaikan (William Dunn, 2003: 608). Pemahaman lengkap mengenai evaluasi kebijakan mempunyai tiga implikasi: (1) evaluasi awal, yaitu evaluasi sejak proses perumusan kebijakan hingga pelaksanaan (*ex-ante evaluation*), (2) evaluasi pada pelaksanaan atau pemantauan, (3) evaluasi akhir (*ex-post evaluation*) (Deddy Mulyadi, 2015:86).

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah yang dialami baik oleh negara maju hingga berkembang, namun lebih sering dialami negara berkembang belum stabil dan berkelanjutannya kondisi pembangunan negara. Kemiskinan, sebaliknya, dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dialami oleh individu atau kelompok individu yang tidak bisa mengatur kehidupannya pada tingkat yang dianggap normal. Kemiskinan, berdasarkan pendapat Ravallion, diartikan sebagai kelaparan, tidak mempunyai tempat tinggal, dan tidak memiliki sarana untuk berobat ketika sakit. Masyarakat miskin secara umum tidak bisa membaca karena tidak memiliki dana untuk pendidikan, tidak bekerja, takut akan masa mendatang, kehilangan anak karena sakit.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan sosial yang bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditunjuk sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pemerintah meluncurkan program ini sejak tahun 2017. PKH merupakan program Kementerian Sosial dan dilaksanakan di seluruh daerah oleh Dinas Sosial. Program ini termasuk dalam Klaster I strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia yang terkait dengan edukasi, kesehatan, dan pengayaan dasar bagi lansia dan penyandang disabilitas berat.

Tujuan PKH adalah menurunkan angka kemiskinan, memutus siklus kemiskinan, peningkatan kualitas SDM dan mengubah tindak RTM, terutama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan kelompok RTM.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian dikaji melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta analisis ini memaparkan hasil penelitian yang berkaitan berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dilanjutkan dengan interpretasi dan kesimpulan. Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah mengelompokkan dan mengkategorikan data untuk mendapatkan gambaran yang sistematis terkait pelaksanaan program PKH, kemudian melakukan analisis deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pengertian dan definisi secara ilmiah guna

mendapatkan gambaran secara sistematis terkait dengan evaluasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang .

Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi sebagai pusat inti dari penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya fokus penelitian akan membantu peneliti dalam memutuskan data-data yang akan dihimpun. Selain itu, fokus penelitian akan memudahkan dalam melakukan penelitian karena penelitian ini memiliki batasan. Fokus penelitian ini di antaranya:

- 1) Evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang berdasarkan teori William N Dunn (2003:158) tentang enam variabel untuk penilaian kebijakan terdiri dari: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan.
- 2) Aspek penunjang dan hambatan selama proses pengentasan kemiskinan melalui PKH di Kota Malang.

Situs dan Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Malang yang bertempat di Jalan raya Ki Ageng Gribig No.5, Kedungkandang, Kota Malang, Pemilihan lokasi ini karena instansi tersebut merupakan instansi yang bertanggung jawab untuk menjalankan program PKH di wilayah Kota Malang.

Sumber Data

Penggunaan sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a) Data Primer
Data primer adalah data yang didapatkan melalui aktivitas penelitian secara langsung kepada subjek penelitian dengan melakukan kegiatan wawancara kepada beberapa informan yaitu pegawai Dinas Sosial dan masyarakat peserta PKH.
- b) Data sekunder
Data sekunder berupa data pendukung yang biasanya didapat dari riset pustaka berasal dari buku, peraturan, dan dokumen berkaitan dengan evaluasi kebijakan program PKH.

Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian dikumpulkan melalui beberapa teknik, di antaranya yaitu:

- a) Wawancara
Data penting diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang sudah ditetapkan. Dua model wawancara dimanfaatkan peneliti sebagai pendekatan. Pertama, wawancara terstruktur di mana tanya

jawab dengan narasumber dilaksanakan secara menyeluruh dan sistematis untuk mengidentifikasi permasalahan dan pertanyaan yang ingin diajukan. Selanjutnya, wawancara tidak terstruktur, di mana wawancara dilakukan oleh peneliti tanpa bantuan daftar pertanyaan. Dengan kata lain, wawancara berjalan secara alami.

b) Observasi

Observasi ini dilakukan dengan mengamati tingkah laku dalam situasi tertentu kemudian secara sistematis mencatat dan menginterpretasikan peristiwa yang diamati. Pengamatan yang dimaksud bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung tentang pranata sosial yang ada di wilayah penelitian. Peneliti melihat bagaimana kebijakan program PKH yang dilaksanakan langsung di Kantor Dinas Sosial Kota Malang.

c) Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi melengkapi penggunaan metode wawancara dan observasi. Karena dokumentasi bertujuan guna memperoleh data pendukung analisis dan interpretasi data, maka wawancara dan observasi akan lebih dapat dipercaya bila didukung oleh dokumentasi. Selama melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Malang, beberapa dokumen yang peneliti lakukan antara lain pengumpulan data berupa foto dan gambar dari website yang menampilkan subjek penelitian.

Teknik Analisis Data

Berdasarkan penjelasan Miles, Huberman, dan Saldana (2014:16) dengan penggunaan model interaktif untuk menggabungkan teknik analisa data, yaitu metode menggabungkan serta menyusun urutan data menjadi pola, kelompok, dan unit teknis dasar. Prosedur berikut diikuti untuk melakukan analisis data. Berikut ini urutan analisa data yang dilakukan peneliti:

a) Pengumpulan Data

Tahap ini terdiri dari pengambilan, pencatatan, dan pengumpulan data secara subyektif sebagai hasil dari teknik pengumpulan data.

b) Kondensasi Data

Kompresi data untuk memperkuat data penelitian. Kondensasi data meliputi kegiatan meringkas catatan lapangan dengan memilih topik-topik penting yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Pemilihan ini akan membantu peneliti akan gambaran jelas bagaimana kebijakan program PKH akan dilaksanakan. Sehingga hal ini akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai masalah ini.

c) Penyajian Data

Penyajian data adalah pengolahan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Setelah data diolah, berikutnya data disajikan sebagai pola yang dapat menggambarkan keadaan di lapangan.

d) Penarikan Kesimpulan

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari analisa data. Kesimpulan awal peneliti bersifat tentatif dan dapat berubah jika bukti tambahan terungkap selama fase pengumpulan data. Kesimpulan awal hanya dapat diterima jika didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten.

Keabsahan Data

Untuk pengujian data yang telah didapatkan, peneliti uji keabsahan data Melalui teknik berikut ini:

1. Uji kredibilitas atau kepercayaan dilakukan oleh peneliti dengan memperluas jangkauan observasi, meningkatkan akurasi penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan verifikasi anggota.
2. Uji ketertanggungjawaban atau dependability pengujian ini dilakukan oleh peneliti dengan melakukan audit secara menyeluruh.. Hal ini dilakukan melalui konsultasi dengan pembimbing, kemudian pembimbing dan peneliti mengaudit seluruh proses penelitian, termasuk menentukan masalah, penelitian di lapangan, pemilihan sumber data, analisa data, pengujian validitas data, dan pelaporan hasil penelitian. Audit ini dilakukan agar penulis dapat mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan penelitian.

Pembahasan

Untuk mengetahui terkait dengan evaluasi kebijakan program PKH secara keseluruhan di kantor Dinas Sosial Kota Malang, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan terkait. Penelitian ini mendeskripsikan evaluasi kebijakan Program PKH di Kantor Dinas Sosial Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian di atas, pembahasan ini mencakup enam variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan evaluasi kebijakan, yaitu aspek-aspek evaluasi kebijakan berdasarkan William N Dunn (2003:158).

1. Efektivitas

Indikator evaluasi kebijakan yang pertama ialah mengukur efektivitas kebijakan tersebut. Maka yang dimaksud disini berarti peneliti melakukan pengukuran sejauh mana pencapaian hasil yang dikehendaki. Melalui indikator tersebut, peneliti melakukan pengukuran bagaimana kebijakan PKH apakah sudah terwujud seperti harapan atau sebaliknya.

Penelitian menunjukkan bahwa tujuan PKH adalah menurunkan angka kemiskinan

dan memutus siklus kemiskinan, peningkatan SDM, serta mengubah tindakan masyarakat miskin. Namun, dalam mewujudkan tujuan tersebut, realisasinya kurang efektif dan masih diiringi dengan beberapa permasalahan.

Dapat dikatakan efektivitas implementasi program terbilang kurang. Alasannya, mayoritas keluarga penerima manfaat mengalami kendala alat bayar yang bermasalah yaitu dengan adanya ATM / buku tabungan yang terblokir maupun hilang. Penerima manfaat tidak segera mengurusnya sehingga bantuan tidak terserap ke rekening penerima manfaat. Sistem terbaru yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial banyak penerima program yang diberhentikan by sistem juga menjadi alasan yang menyebabkan keluarga penerima manfaat tidak mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, implementasi program ini diiringi pula dengan solusi dan langkah-langkah yang solutif untuk memberikan hasil yang optimal.

Selanjutnya, banyak ditemukan Masyarakat yang sering kali tidak hadir pada saat pertemuan rutin dengan kegiatan P2K2 yang diberikan materi tentang Pendidikan anak, Kesehatan anak, materi gizi dan materi stunting. Ditemukan bahwa kurangnya efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan karena masih ditemukannya banyak permasalahan. Bantuan sosial program tersebut dinilai belum mampu mengurangi angka kemiskinan.

2. Efisiensi

Indikator yang kedua, menurut Dunn (2003:430) efisiensi, sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah hubungan antara efektivitas dan upaya, serta umumnya diukur dalam biaya moneter. Dalam hal ini, bagaimana tingkat efisiensi yang dihasilkan melalui adanya PKH yang dilaksanakan Dinsos. Evaluasi kebijakan PKH juga berfokus pada efisiensi pelaksanaannya, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut efisien dalam hal waktu, terbukti hemat energi dan efisien secara finansial.

Dari hasil penelitian, efisiensi waktu PKH dapat diperoleh berdasarkan besaran nominal dana yang diterima serta durasi proses penyaluran dana. Nominal dana yang diperoleh penerima manfaat terbagi menjadi beberapa kategori, ibu hamil sebanyak Rp 750,000/ 4 kali tiap tahun, Balita Rp 750,000/ 4 kali tiap tahun, SD Rp 225,000/ 4 kali tiap tahun, SMP Rp 375,000/ 4 kali tiap tahun, SMA Rp 500,000/ 4 kali tiap tahun, Lansia Rp 600,000/ 4 kali tiap tahun, penyandang disabilitas Rp 600,000/ 4 kali tiap tahun.

Dalam hal ini, proses pencairan dana saat diberikan kepada keluarga penerima manfaat

dilakukan dalam 3 bulan sekali. Dengan adanya pencairan dana setiap 3 bulan sekali keluarga penerima manfaat berhak mendapatkan dana sesuai dengan komponen yang diterima. Masih adanya kendala tentang pemahaman rincian dana yang harus diterima setiap pencairan dana, dan keluarga penerima manfaat harus diberikan pemahaman terus-menerus tentang informasi pencairan dana program keluarga harapan tersebut. Sehingga Masyarakat penerima bantuan mendapatkan dana sesuai dengan komponen yang seharusnya diterima, maka dalam menerima bantuan Masih adanya kendala tentang pemahaman rincian dana yang harus diterima setiap pencairan dana, dan keluarga penerima manfaat harus diberikan pemahaman terus-menerus tentang informasi pencairan dana program keluarga harapan tersebut. Sehingga Masyarakat penerima bantuan mendapatkan dana sesuai dengan komponen yang seharusnya diterima, maka dalam menerima bantuan. Maka kata efisien masih belum mampu dicapai sepenuhnya karena mayoritas masyarakat belum mengerti tentang rincian dana yang harus mereka terima setiap proses pencairan dana.

3. Kecukupan

Indikator yang ketiga, kecukupan (*adequacy*), mengacu pada seberapa efektif pemenuhan kebutuhan, nilai, atau peluang yang menimbulkan masalah (Dunn, 2003:430). Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang diinginkan tercapai dan sejauh mana pencapaian hasil mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kepuasan kebutuhan, nilai, atau peluang. Dukungan melalui program PKH memberikan keringanan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan. Pelaksanaan program keluarga harapan berdasarkan kecukupan kebijakan menunjukkan bahwa pelaksanaan masih kurang menyelesaikan permasalahan, berkaitan dengan masalah keuangan keluarga.

4. Perataan

Indikator yang keempat yaitu perataan. William N. Dunn menganggap bahwa standar kesamaan (*equity*) berkaitan dengan rasionalitas hukum serta sosial yang merujuk pada penyaluran hasil serta upaya pada berbagai kelompok masyarakat. PKH menyasar keluarga miskin dan rentan berdasarkan data kesejahteraan terpadu. Sejauh ini penerima manfaat program mencapai angka 10.656 warga penerima, jumlah tersebut juga bisa bertambah ataupun berkurang. Paling banyak yang menerima bantuan yakni Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun. Akan tetapi, tidak semua

masyarakat kurang mampu merasakan manfaat program ini, dikarenakan kuota bantuan sangat terbatas dari pusat. Maka masyarakat harus menunggu jikalau ada yang sudah mampu untuk tidak menerima bantuan kembali. Dalam hal perataan, kebijakan program keluarga harapan tersebut dapat dikatakan belum mencapai hasil yang merata.

5. Responsivitas

Indikator yang kelima, yaitu responsivitas. Berdasarkan penjelasan William N. Dunn indikator ini berkaitan dengan kepuasan akan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat karena kebijakan tersebut. Hal ini bisa diukur dari kepuasan objek dari kebijakan yang mana dalam hal ini adalah masyarakat penerima bantuan. Jika dilihat bahwa masyarakat penerima bantuan saat ini sudah berada di taraf yang lebih baik. Hal ini didukung melalui penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana guna mendukung proses pelaksanaan program. Masyarakat penerima bantuan menganggap adanya program ini sangat membantu serta memuaskan. Dalam program keluarga harapan juga membantu Pendidikan dan Kesehatan, sehingga penerima bantuan merasa sangat bersyukur dan bisa meringankan beban pengeluaran keluarga.

6. Ketepatan

Indikator yang keenam mengenai perbandingan nilai manfaat program dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui ketepatan program tersebut. Pelaksanaan PKH di Kota Malang dinilai belum tepat. Bahwasannya point dari ketepatan menunjukkan bahwa program keluarga harapan ini belum tepat karena Masyarakat penerima bantuan belum sepenuhnya bermanfaat untuk peserta. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya PKH, dan dukungan ini bisa meringankan beban pengeluaran keluarga.

Selain itu, pengadaan PKH membuat anak-anak memiliki intensi dan kesempatan melanjutkan pendidikan mereka. Namun, secara umum pemanfaatan bantuan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Mayoritas peserta PKH masih enggan mengolah bantuan untuk praktik kewirausahaan. Hal ini jelas sangat disayangkan karena pemanfaatan bantuan yang bijak akan turut menambah penghasilan dan pada akhirnya mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan.

Dinas Sosial Kota Malang telah berupaya secara maksimal untuk melaksanakan program keluarga harapan ini. Dari upaya yang telah dilakukan mampu membuktikan bahwasannya hingga saat ini mampu memberikan bantuan kesejahteraan sosial dan juga sosialisasi terhadap masyarakat. Hal tersebut juga didasari

dengan cara menyusun rencana-rencana setiap tahun untuk kepentingan program keluarga harapan.

Dari keenam variabel penentu keberhasilan evaluasi kebijakan oleh William N Dunn sebagai tolak ukur program PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang dapat disimpulkan dari hasil pembahasan di atas bahwasanya meskipun secara keseluruhan evaluasi kebijakan program PKH di Kantor Dinas Sosial Kota Malang telah berjalan cukup baik, akan tetapi dari keenam variabel tersebut pada masing-masing variabel masih ditemukan adanya permasalahan seperti pada variabel efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan dan ketepatan.

Meskipun apabila dilihat secara keseluruhan permasalahan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap pelaksanaan evaluasi program PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang. Namun, terkait dengan evaluasi kebijakan, dapat dikatakan PKH di Kota Malang belum terlaksana secara sempurna dikarenakan masih ditemukan adanya masalah dari setiap variabel penilaian.

Jika melihat pelaksanaan penilaian kebijakan suatu program, maka pada implementasinya pasti juga dapat diketahui aspek penunjang dan hambatan yang mengiringi implementasi program tersebut. Analisa aspek penunjang dan hambatan pada PKH di Kota Malang perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa baik program PKH ini berjalan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam Evaluasi Kebijakan Program PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang diketahui beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan program PKH, diantaranya:

1. Terdapat rutinitas koordinasi dan komunikasi antara pendamping PKH dengan Dinas Sosial untuk melaporkan *progress* pelaksanaan program. Hal ini menjadi faktor utama suksesnya pelaksanaan kebijakan.
2. Adanya sumber daya yang berkualitas untuk mendukung terlaksananya program PKH di Kota Malang. Para pihak yang bertugas dalam pelaksanaan program PKH berkualitas dan kompeten dalam bidangnya. Dan harus memahami aturan terkait dengan pelaksanaan PKH, sehingga dapat bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan PKH.
3. Sarana serta prasarana yang memadai para pelaksana program mendukung penuh terkait adanya PKH. Hal ini dibuktikan dengan adanya benda/alat yang bermanfaat

untuk melakukan pelaksanaan program. Selain itu dukungan dari pihak kecamatan maupun pihak kelurahan mendukung penuh adanya kegiatan program keluarga harapan ini hal ini dibuktikan dengan pihak kecamatan yang proaktif dalam setiap tahapan pelaksanaan PKH.

4. Partisipasi masyarakat, dimana dalam hal ini sangat diperlukan dalam program keluarga harapan. Apabila Masyarakat enggan untuk mengikuti musyawarah setiap bulannya, jadi tidak bisa menyuarkan masalahnya dari penerimaan bantuan ini. Maka tujuan dari program ini tidak dapat dicapai dan terlaksana dengan baik.

Tidak hanya faktor-faktor penunjang saja, melainkan terdapat hambatan dalam melaksanakan evaluasi kebijakan program keluarga harapan di Kota Malang, yaitu:

1. Alat bayar keluarga penerima manfaat (KPM) bermasalah. Pada praktik PKH, masyarakat yang menerima bantuan tersebut dapat memproses pencairan dana yang sudah disesuaikan dengan komponen yang mereka miliki, sehingga bantuan tersebut juga disalurkan melalui Bank BNI dan Kantor pos. Namun, kebanyakan Masyarakat kurang memahami dan enggan untuk segera mengurus alat bayar yang bermasalah tersebut, dengan ketentuan dalam proses pencairan dana. Hal ini mengakibatkan uang bantuan tersebut akan Kembali ke kas negara, sehingga hal ini cukup menghambat pelaksanaan program keluarga harapan.
2. Penerima manfaat belum menerima alat bayar. Kesulitan dialami masyarakat dalam proses memperoleh bantuan yang seharusnya mereka terima. Untuk mendapatkan bantuan tersebut Masyarakat menunggu adanya kiriman buku tabungan dan ATM karena kiriman tersebut juga masih memerlukan waktu kiriman dari pusat. Dan kendala yang sama juga terdapat di Kantor Pos yakni Masyarakat penerima bantuan juga tidak mendapatkan undangan bantuan dari kantor pos untuk mendapatkan hasil bantuan tersebut. Hal ini menghambat dalam Masyarakat menerima bantuan.
3. Jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai dengan komponen yang dimiliki, bahwa terdapat beberapa jumlah bantuan masing-masing komponen yang diterima tidak sesuai. Selain itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang belum diperbaharui membuat bantuan tidak terbaca dengan data yang sesungguhnya.

Apabila data belum segera diperbaharui akan mengakibatkan bantuan tidak akan diberikan.

4. Masih banyak warga kurang mampu belum menerima bantuan sosial, Bahwa warga yang kurang mampu harusnya dapat menerima bantuan. Akan tetapi, mereka yang belum bisa menerima bantuan karna kuotanya juga sangat terbatas. Padahal Masyarakat miskin yang berhak menerima pun juga masih banyak.
5. Perubahan mental/*mindseat* masyarakat penerima bantuan, adanya Masyarakat penerima bantuan yang sudah dirasa mampu untuk secara sukarela mundur dari penerima bantuan. Mengubah Masyarakat yang seperti itu masih menjadi tantangan. Dikarenakan kuota penerima bantuan juga terbatas.
6. Sistem terbaru di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial banyak peserta PKH yang dikeluarkan by sistem tanpa adanya konfirmasi, dari dinas sosial sendiri masih rencana bersurat ke Kementerian Sosial untuk melaporkan hal tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan peneliti dapat disimpulkan penilaian kebijakan program PKH untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Malang masih kurang memenuhi variabel penilaian kebijakan berdasar pada teori William N Dunn bahwasanya keberhasilan evaluasi dipengaruhi oleh beberapa variabel sebagai berikut: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil pengkajian pada masing-masing variabel menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya permasalahan seperti pada variabel efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan dan ketepatan. Meskipun apabila dicermati keseluruhan permasalahan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap pelaksanaan evaluasi program PKH di Kota Malang. Namun, berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh William N Dunn mengenai penilaian kebijakan maka dapat dikatakan program ini belum terealisasi secara sempurna. Hal ini ditandai dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi dari setiap variabel penilaian. Selain itu juga ditemukan beberapa aspek penunjang dan hambatan pada pelaksanaan program PKH di Kota Malang.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dan mungkin bermanfaat bagi pelaksanaan program PKH di Kota Malang, di antaranya adalah:

1. Bagi Dinas Sosial Kota Malang agar lebih mengoptimalkan sistem pendataan yang terbaru dan akurat berdasarkan pada pedoman dan syarat yang berlaku untuk mencapai tujuan dari

program keluarga harapan serta dapat menjangkau sasaran yang diharapkan sehingga membantu mengurangi kemiskinan.

2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sistem alat bayar keluarga penerima manfaat yang sering terjadinya kesalahan agar tidak terjadinya miss komunikasi antara pihak Dinas Sosial dan peserta penerima bantuan PKH.
3. Memberikan informasi seperti halnya prosedur-prosedur yang akurat terkait dengan pencairan dana yang diterima oleh peserta PKH agar Masyarakat mengetahui rincian yang diberikan.
4. Masyarakat agar mendapatkan manfaat dari program keluarga harapan maka perlu bersikap kooperatif dengan mendaftarkan diri sebagai peserta Program Keluarga Harapan dengan tidak mengabaikan kelengkapan data yang harus dipenuhi.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, M.B dan Huberman, A.M. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. 2000. *Ekonomi Rakyat dan program IDT*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, D Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Undang-Undang:**
- Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program-Program Pembangunan yang Adil.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengetasan Kemiskinan.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1 tentang Program PKH.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

UU No. 140 Tahun 2014 tentang Jaminan Sosial.

Sumber Jurnal:

- Anwar, F., & Untari, N. (2020). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Program Keluarga Harapan. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 2(1), 11-17.
- Darmadi, D., Yusuf, D. A. P., Firnanda, Y. A. Y., & Nathanie, R. W. (2021). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(5), 806-818.
- Humairoh, U., & Utomo, S. J. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Kabupaten Bangkalan. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 1(2).
- Ishartono, Santoso Tri Raharjo. (2016). Sustainable Developments Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Jurnal*, 6 (2), 154-272.
- Mahmud, F., & Mustari, N. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 17-33.
- Sari, A. G., & Marom, A. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Mengatasi Permasalahan Pendidikan Dan Kesehatan Di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1), 17-29.
- Sumber Internet:**
- Badan Pusat Statistik. (2022). Presentase Penduduk Miskin Kepulauan di Indonesia. Maret. BPS Indonesia. Jakarta.
- Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur (2009). Dinsos Jatim Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/19075#:~:text=Ini%20dilakukan%20dua%20hari%20di%2021%20lokasi%2C%20dari,program%20PKH%20di%20Jatim%20tahun%20ini%20terbilang%20sukses.> (Diakses pada 17 Maret 2023)
- Radar Malang Jawa Pos (2022). Kemiskinan di Malang Raya Masih Tinggi. <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/24/07/2022/kemiskinan-di-malang-raya-masih-tinggi/>. (Diakses pada 16 Februari 2023)
- Setyo Puji (2021). Pengakuan Pendamping PKH Yang Korupsi Rp 450 Juta, Untuk Beli Motor Dan Perabot Rumah tangga. <https://regional.kompas.com/image/2021/08/09/190742878/pengakuan-pendamping-pkh-yang-korupsi-rp-450-juta-uangnya->

- untuk-beli-motor?page=1. (Diakses pada 19 Maret 2023)
- Mardi Sampurno (2022). 80 persen bantuan Pendidikan program keluarga harapan. <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811086602/80-persen-bantuan-pendidikan-program-keluarga-harapan> (Diakses pada 20 Agustus 2023)
- Pipit Anggraeni (2019). Ratusan KK di Kota Malang dicoret dari daftar keluarga penerimamanfaatPKH. <https://www.malangtimes.com/baca/41906/20190722/134700/ratusan-kk-di-kota-malang-dicoret-dari-daftar-keluarga-penerima-manfaat-pkh> (Diakses pada 20 Agustus 2023)